



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

masuk dan bahan pertimbangan untuk analisis, usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Agustus 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024

**RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan KaruniaNya. Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan Dokumen tahunan Rencana Kerja yang telah disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam jangka waktu satu tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan penyesuaian anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang lebih optimal.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kami menyadari atas kekurangan dan keterbatasan kami, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mungkin masih terdapat kelemahan, maka kami harapkan koreksi dan masukan penyempurnaan lebih lanjut agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi demi terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah

Painan, 24 Juli 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi



M. H. RIARTY ZAINUL, SE. Ak. M. Si
NIP. 19790529-200212 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.	8
Bab. II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi Tahun 2022	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	29
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
Bab III Tujuan Dan Sasaran Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi	56
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	57
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	58
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	75
Bab V Penutup	79

DAFTAR TABEL

Tabel .2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan	13
Tabel .2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	30
Tabel.2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	37
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	55
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	59
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas : RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas : RENSTRA Perangkat Daerah dan RENJA Perangkat Daerah.

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang kemudian diubah dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan

Transmigrasi yang telah mencakup uraian tugas Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya untuk mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan membuat Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja satuan pemerintah daerah (RENJA-OPD) merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2. Proses Penyusunan RENJA

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan RENJA OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah :

1. Substansi RENJA merupakan materi Rancangan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati no 21 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023;
5. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1.1.3 Keterkaitan Antara RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja adalah penjabaran dari RENSTRA OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya mulai dari dokumen RKPD, RENSTRA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026, RENJA Kementerian dan Lembaga terkait dengan Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi, serta RENJA Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang
9. pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor perdagangan, perindustrian dan transmigrasi selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor perdagangan, perindustrian dan transmigrasi serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun

kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara baik dan optimal.

1.4 Sistematika

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tranmigrasi Tahun 2021
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
2.3.	Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
3.3..	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perdagangan Dan
Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian RENSTRA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dengan menggunakan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 mengacu pada APBD tahun 2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada tabel 2.1.

Secara umum, garis besar pokok materi yang disampaikan pada tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

1. Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 dibuat dengan asumsi bahwa seluruh target outcome, output kegiatan dan output subkegiatan pada tahun 2023, tercapai 100%. Dengan asumsi tersebut diperkirakan hingga tahun 2023 seluruh indikator outcome pada program Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dicapai dengan tingkat capaian diatas 80%, dengan capaian terendah pada indikator persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan capaian 86%.
2. Pada tahun 2023 dilakukan rasionalisasi Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebagai hasil reuiu RPJM Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, yang kemudian berdampak pada perubahan

beberapa indikator outcome dan output kegiatan, diantaranya persentase peningkatan omset perdagangan dan persentase peningkatan omset IKM. Indikator-indikator ini dihilangkan mulai pada periode Renja tahun 2023.

3. Pada tahun 2022, diupayakan semua indikator output kegiatan dan output subkegiatan dapat dipenuhi, namun ada beberapa output subkegiatan diantaranya subkegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan indikator jumlah laporan, hanya dapat terpenuhi 67%. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sistem penyampaian informasi perdagangan yang terkoordinir melalui aplikasi/ website resmi dari Kementerian perdagangan, sedangkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada pada tahun 2022 tersebut. Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan Kementerian Perdagangan baru dapat digunakan pada tahun 2023.
4. Kebijakan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan indikator input (anggaran) Renja tahun 2023 terkait hasil evaluasi tahun 2022 adalah : (1) Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dirasa perlu sebagai langkah penanggulangan inflasi (2) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan telah menjadi prioritas nasional dalam mendukung penerapan TKDN dan P3DN, oleh karena itu hal tersebut akan menjadi prioritas dinas dalam penyusunan anggaran nantinya (3) Pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi pasar rakyat akan terus dilanjutkan (4) Untuk menyikapi laporan rendahnya capaian kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB pada tahun 2022, maka pada tahun 2024 akan diupayakan langkah prioritas bidang perindustrian dengan mengoperasikan sentra-sentra IKM yang telah dibangun dengan didukung oleh sumber daya yang cukup, untuk itu

kegiatan pendukung operasional sentra IKM akan menjadi prioritas (5)
Peningkatan kapasitas SDM dan pembangunan infrastruktur di Kawasan
Transmigrasi akan terus dilanjutkan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) hingga Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan Sekretariat Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA	5.687.150.256	NA	4.451.071.120	100%	100%	100	NA	100%	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
		Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA		NA		100%	100%	100	NA	100%	100%
		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%		100%		NA	NA	NA	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0		0		NA	NA	NA	0	0	100%
		Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	95%		95%		NA	NA	NA	95%	95%	100%
		Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	9		1		5	5	100	3	9	100%
		Kategori keterbukaan informasi publik	95		95		NA	NA	NA	95	95	100%
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase capaian realisasi keuangan Prog dan keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA	4.737.308.094	90%	3.877.962.250	90%	90%	100	NA	90%	90%
		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	12 dokumen		NA		NA	NA	NA	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	912 orang	4.592.488.300	NA	3.740.762.250	456 orang	456 orang	100	456 orang	912 orang	100%
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 dokumen	144.819.794	NA	137.200.000	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	16 dokumen	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA	181.767.527	100%	178.904.636	100%	100%	100	NA	100%	100%
		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	15		NA		NA	NA	NA	15	15	100%
		Persentase dokumen publik dan dipublish	95		NA		NA	NA	NA	95	95	100%
		Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	5		NA		NA	NA	NA	5	5	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	4.757.676	NA	4.933.900	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 paket	33.125.211	NA	36.692.500	3 paket	3 paket	100	3 paket	6 paket	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16 paket	16.385.240	NA	23.918.020	8 paket	8 paket	100	8 paket	16 paket	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108 eksemplar	5.670.000	36 eksemplar	4.320.000	36 eksemplar	24 eksemplar	67	36 eksemplar	96 eksemplar	89%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	0	-	0	0	100	0	0	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	-	0	-	0	0	100	0	0	100%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 laporan	4.376.400	12 laporan	38.323.550	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 laporan	117.453.000	100 laporan	70.716.666	100 laporan	100 laporan	100	80 laporan	280 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	95%	277.679.144	100%	171.902.434	100%	100%	100	95%	98%	104%
	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	168.745.876	12 laporan	120.214.934	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	108.933.269	12 laporan	51.687.500	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	100%
	Pemeliharaana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	387.839.192	90%	222.301.800	90%	90%	100	90%	90%	100%
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	54.000.000	0	-	0	0	100	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	74.811.692	6 unit	69.220.800	5 unit	5 unit	100	4 Unit	15 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	68 unit	8.767.500	20 unit	9.925.000	24 unit	24 unit	100	24 unit	68 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	9 unit	304.260.000	2 unit	143.156.000	3 unit	3 unit	100	4 unit	9 unit	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	0 unit	-	0	-	0	0	100	0	0 unit	100%
	Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sesuai standar	NA	70.000.000	0	-	95%	95%	100	NA	95%	95%
		Persentase capaian kinerja program / keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA		0		80%	80%	100	NA	80%	80%
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20 dokumen		0		NA	NA	NA	20 dokumen	20 dokumen	100%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	-	NA	-	4 laporan	0 laporan	0	16 laporan	16 laporan	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	70.000.000	NA	-	3 laporan	0 laporan	0	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	0	-	0	-	0	0	100	0	0	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	0	-	0	0	100	0	0	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	32.556.300	0	-	90%	90%	100	90%	90%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	32.556.300	0	-	4 unit	4 unit	100	6 unit	10 unit	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9%	218.475.740	5,25%	2.947.250	<9%	8,89%	98,78	<9%	7,7%	86%
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	17%	78.751.773	14,6%	1.947.250	16,20%	18,97%	117	17%	19%	112%
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	1.947.250	0 dokumen	0 dokumen	100	0 dokumen	2 dokumen	100%
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 laporan	38.751.773	0	-	2 laporan	2 laporan	100	0 laporan	2 laporan	100%
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Data perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya	NA	97.128.155	NA	1.000.000	4 dokumen	4 dokumen	100	NA	4 dokumen	0%
		Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90%		0%		90%	82,48%	92	90%	86%	96%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3 laporan	29.767.500	1 laporan	1.000.000	0 laporan	0 laporan	100	1 laporan	2 laporan	67%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 laporan	67.360.655	0	-	0 laporan	2 laporan	200	3 laporan	5 laporan	167%
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90%	42.595.812	0	-	90%	82,48%	92	90%	86%	96%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Agen dan Pasar Rakyat.	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	42.595.812	0	-	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan omset perdagangan	NA	700.000.000	5,9%	202.920.286	6,20%	6%	97	NA	6,0%	
		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar		NA		1 pasar	1 pasar	100	2 pasar	2 pasar	100%
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,48%	700.000.000	0,40%	202.920.286	0,9%	0,32%	36	0,10%	0,82%	171%
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 UTTP	620.000.000	33 UTTP	202.920.286	140 UTTP	387 UTTP	276,43	250 UTTP	670	84%
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 pelaku usaha	80.000.000	0 pelaku usaha	-	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	100	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset perdagangan	NA	710.984.684	5,90%	-	6,20%	6%	97	NA	6%	
		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%		NA		NA	NA	NA	2%	2%	100%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan volume penjualan komoditi unggulan daerah dalam negeri	NA	710.984.684	0	-	2%	2%	100	NA	2%	0%
		Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20 komoditi		0		NA	NA	NA	20 komoditi	20 komoditi	100%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	496.125.000	0 UMKM	-	0 UMKM	0 UMKM	100	10 UMKM	10 UMKM	100%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25 UMKM	165.375.000	0 UMKM	-	0 UMKM	0 UMKM	100	0 UMKM	0 UMKM	0%
	Peningkatan sistem jaringan dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 database	49.484.684	0	-	1 database	1 database	100	1 database	1 database	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset perdagangan	NA	250.000.000	5,9	-	6,20%	6%	NA	NA	6%	0%
		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2,00%		0	-	NA	NA	2,00%	2,00%	2%	100%
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk/ komoditi potensial ekspor	NA	250.000.000	0	-	0	0	100	NA	0	0%
		Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	5 produk		0		0	0	100	5 produk	5 produk	100%
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 pelaku usaha	150.000.000	0 pelaku usaha	-	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	100	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0%
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	3 pelaku usaha	100.000.000	0	-	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	100	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan omset perdagangan	NA	2.845.561.651	5,9	2.106.096.350	6,20%	6%	97	NA	6%	0%
1		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 Pasar		2 Pasar		1 pasar	1 pasar	100	2 Pasar	2 Pasar	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	NA	2.200.000.000	2 Pasar	1.597.087.700	1 pasar	1 pasar	100	NA	2 Pasar	0%
		Jumlah Pasar Rakyat	50 pasar		NA		NA	NA	NA	50 pasar	50 pasar	100%
		Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	915 pedagang		NA		NA	NA	NA	915 pedagang	915 pedagang	100%
	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50 unit	2.200.000.000	NA	1.597.087.700	50	50	100	50 unit	50 unit	100%
		Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi	6 pasar		1 pasar		4 pasar	4 pasar	100	1 pasar	6 pasar	100%
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	NA	645.561.651	2 Pasar	509.008.650	1 pasar	1 pasar	100	NA	2 Pasar	0%
		Jumlah Pasar Rakyat	50 pasar		5		NA	NA	NA	50 pasar	50 pasar	100%
		Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	915 pedagang		NA		NA	NA	NA	915 pedagang	915 pedagang	100%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	23 dokumen	645.561.651	NA	509.008.650	11 dokumen	11 dokumen	100	12 dokumen	23 dokumen	100%
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan omset perdagangan	NA	71.000.000	5,9	-	6,20%	6%	97	NA	6%	

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	57,00%		0	-	NA	NA	NA	57,00%	57%	100%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	NA	46.000.000	0	-	0	0	8	NA	0	0%
		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6 izin		0		0	0	100	6 izin	6 izin	100%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi Secara Elektronik	1 rekomendasi	46.000.000	0	-	0	0	100	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	57%	25.000.000	0	-	0	0	100	NA	57,00%	100%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 dokumen	25.000.000	0	-	0	0	100	NA	0	0%
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	5 kali		0	-	0	0	100	NA	0	0%
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3 laporan		0	-	0	0	100	NA	0	0%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan omset IKM (%)	NA	17.916.180.967	NA	13.431.079.564	2%	8,23%	412	NA	8,23%	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	25,00%		80,75		14,2%	79,95%	563	25,00%	25%	100%
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	NA	17.916.180.967	80,75	13.431.079.564	14,2%	79,95%	563	25,00%	25%	0%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
		Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	8%		N A		6,28%	28,2%	448	8%	8%	100%
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	19541 orang		N A		NA	NA	NA	19541 orang	19541 orang	100%
		Jumlah Sentra IKM	2 unit				NA	NA	NA	2 unit	2 unit	100%
		Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/CPPOB, HKI, SNI) (produk)	160 sertifikat		N A		NA	NA	NA	160 sertifikat	160 sertifikat	100%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	0		N A	-	0	0	100	0	0	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11 dokumen	350.000.000	0	-	5 dokumen	5 dokumen	100	6 dokumen	11 dokumen	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 dokumen	54.600.000	0	-	2 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	16 dokumen	17.511.580.967	N A	13.431.079.564	4 dokumen	4 dokumen	100	12 dokumen	16 dokumen	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan omset IKM (%)	NA	51.250.000	N A	30.947.950	2%	8,23%	412	NA	8,23%	
		Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	14,48 %		0		NA	NA	NA	14,48%	14,48%	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	51.250.000	0	30.947.950	100%	28,45%	28	100%	43%	43%
		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA		0		0	0	100	NA	0	0%
		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA		NA		0	0	100	NA	0	0%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/ Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	24 doku men	26.250.000	0	26.947.950	12 dokumen	2 dokumen	16,7	12 dokumen	14 dokumen	58%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	4 dok ume n	25.000.000	1 dokumen	4.000.000	0 dokumen	0 dokumen	100	0 dokumen	1 dokumen	25%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkatan omset IKM (%)	NA	218.039.874	NA	62.006.600	2%	8,23%	412	NA	8,2%	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	25,0 %		80,75		14,2%	79,95%	563	25,0%	25,0%	100%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100 %	218.039.874	65%	62.006.600	100%	65%	65	100%	77%	77%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	17 dok ume n	68.039.874	1 dokumen	62.006.600	15 dokumen	15 dokumen	100	1 dokumen	17 dokumen	100%
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	15 dok ume n	150.000.000	0	-	0	0	100	15 dokumen	15 dokumen	100%

1	2	3	4			5	6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0 kawasan	0	0	-	0	0	100	0 kawasan	0	100%
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	0 hektar	0	0	-	-	-	100	0 hektar	0	100%
		Fasilitasi HPK menjadi APL untuk Transmigrasi lokal (Hektar)	NA		0		0	0	100	NA	0	0%
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	0 dokumen		0	-	0	0	100	0 dokumen	0	100%
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	0 kasus		0	-	0	0	100	0 kasus	0	100%
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 hektar		0	-	0	0	100	0 hektar	0	100%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0 pemukiman	0	0	-	0	0	100	0 pemukiman	0	100%
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah permukiman yang ditata	0 pemukiman		0	-	0	0	100	0 pemukiman	0	100%
		Jumlah KK di pemukiman baru	0 KK		0		0	0	100	0 KK	0	100%
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	0 laporan		0	-	0	0	100	0 laporan	0	100%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0 transmigran		0	-	0	0	100	0 transmigran	0	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	49 lembaga	1.715.499.819	10 lembaga	1.931.532.564	10 lembaga	48 lembaga	480	49 lembaga	49 lembaga	100%
		Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi	44 unit		17 unit		18 unit	43 unit	238,9	44 unit	44 unit	100%
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 unit	1.715.499.819	1 unit	1.931.532.564	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah satuan permukiman yang dibina	1 permukiman		1 permukiman		1 permukiman	1 permukiman	100	1 permukiman	1 permukiman	100%
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	80 KK	115.499.819	0 KK	-	20 KK	20 KK	100	60 KK	80 KK	100%
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 satuan permukiman	1.600.000.000	1 satuan permukiman	1.931.532.564	1 satuan permukiman	1 satuan permukiman	100	1 satuan permukiman	1 satuan permukiman	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan OPD yang menjalankan fungsi Urusan Pemerintah Pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Namun demikian, dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan OPD kunci dalam penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan Perekonomian Daerah yang terlihat pada kontribusi sektor Industri dan sektor Perdagangan yang cukup besar terhadap PDRB. Sehubungan dengan ini, penyelenggaraan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 diarahkan pada pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran terhadap masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang menjadi ruang lingkup Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Review terhadap hasil capaian kinerja pelayanan IKK Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun lalu (n-2) dan proyeksi capaian tahun berjalan (tahun n-1), tahun n dan tahun n+1 mengacu pada target IKK yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun serta proyeksi tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan

N O	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONA L	IK K	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATA N ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
				(TH N-2)	(TH N-1)	(TH N)	(TH N+1)	(TH N-2)	(TH N-1)	(TH N)	(TH N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah		√	5,00%	8,00%	9,00%	9,00%	28,15%	8,00%	9,00%	9,00%	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK		√	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	79,95%	25,00%	30,00%	35,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		√	100%	100%	100%	100%	28,45%	100%	100%	100%	
4	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini		√	100%	100%	100%	100%	65%	100%	100%	100%	
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)		√	55%	57%	60%	62%		57%	60%	62%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)		√	16,2%	17,0%	18,0%	19,0%	18,97%	17,0%	18,0%	19,0%	
7	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		√	0,45%	0,48%	0,50%	0,53%	0,32%	0,48%	0,50%	0,53%	
8	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi		√	48 lembaga	49 lembaga	50 lembaga	51 lembaga	48 lembaga	49 lembaga	50 lembaga	51 lembaga	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Peningkatan omset perdagangan komoditi daerah

Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB diperlukan peningkatan omset pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain :

- a. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;
- c. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perdagangan yang meliputi :
Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
- d. Inflasi yang menyentuh semua lini sektor usaha

Berbagai aktivitas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemasaran produk
- b. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan
- c. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri
- d. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- e. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting.

- f. Mendorong promosi dan jejaring pemasaran serta penggunaan produk-produk lokal melalui partisipasi aktif dalam program/ kebijakan nasional mengenai TKDN dan P3DN
- g. Upaya penanggulangan inflasi dengan acara operasi pasar (penanggulangan jangka pendek), pemantauan harga dan pengendalian ketersediaan bahan pokok (penanggulangan jangka menengah dan panjang)

2. Peningkatan nilai tambah produk IKM

Daya saing produk IKM Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan produk IKM kabupaten lain di Sumatera barat, hal ini terlihat belum banyaknya produk IKM yang menembus pasar dalam negeri, luar negeri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya kualitas produk terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan bordir dan lainnya. Produk yang berkualitas dan berdaya saing dapat dicapai dengan perbaikan proses produksi, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah industri.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah tersebut, pemerintah daerah menfokuskan pembinaan pada sektor unggulan terutama yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Dalam hal ini, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/ BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi. ,
2. Penyediaan sarana dan prasarana melalui bantuan peralatan produksi pada kelompok IKM potensial,

3. Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok IKM melalui fasilitasi pembangunan sentra IKM unggulan
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produksi produk lokal unggulan dalam rangka mewujudkan program nasional TKDN dan P3DN.

3. Kemandirian Lembaga dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

Kemandirian lembaga dan infrastruktur kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif dan mandiri secara finansial di Kawasan transmigrasi
2. Jumlah sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian masyarakat transmigrasi.

Untuk mewujudkan kemandirian ini diperlukan sinergitas beberapa aspek. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain :

1. Belum optimalnya kinerja lembaga masyarakat di kawasan transmigrasi
 - a. Belum optimalnya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut.
 - b. Masih kurangnya pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan di kawasan transmigrasi
 - c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat transmigran terhadap peduli lingkungan terutama untuk menjaga hutan lindung dan lahan gambut
2. Kurangnya pemanfaatan sarana, prasarana/ infrastruktur di kawasan transmigrasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, indikator dan target capaian serta pagu indikatif untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Analisa terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dalam rangka menelaah kebutuhan program, kegiatan, subkegiatan serta pagu indikatif berdasarkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan untuk kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2023. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.3.

TABEL 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEKRETARIAT					SEKRETARIAT					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	6.210.808.853	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	6.260.808.853	
			Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0 delay laporan				Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0 delay laporan		
			Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	91%-100% (Sangat Baik)				Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	91%-100% (Sangat Baik)		
			Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	3				Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kategori keterbukaan informasi publik	95				Kategori keterbukaan informasi publik	95		
	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	4 laporan	4.974.173.498	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	4 laporan	4.974.173.498	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	456 orang	4.822.112.715	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	456 orang	4.822.112.715	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	152.060.783	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	152.060.783	
	Administrasi umum Perangkat Daerah		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	15 pengaduan	256.260.683	Administrasi umum Perangkat Daerah		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	15 pengaduan	256.260.683	
			Persentase dokumen publik dan dipublish	96%				Persentase dokumen publik dan dipublish	96%		
			Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	5%				Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	5%		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	4.995.560	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	4.995.560	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	34.781.472	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	34.781.472	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	17.204.501	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	17.204.501	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 eksemplar	5.953.500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 eksemplar	5.953.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	35.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	123.325.650	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	123.325.650	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	90%	291.563.102	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	90%	291.563.102	
	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	177.183.170	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	177.183.170	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	114.379.932	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	114.379.932	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	414.627.455	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	414.627.455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	57.500.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	57.500.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	28.448.580	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	28.448.580	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24 unit	9.205.875	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24 unit	9.205.875	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	2 unit	319.473.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	2 unit	319.473.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora/direhab	0 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora/direhab	0 unit		
	Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20 dokumen	110.000.000	Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20 dokumen	110.000.000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	30.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	80.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	1085 unit	130.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	1085 unit	180.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	50.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	130.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	130.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	34.184.115	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	34.184.115	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 unit	34.184.115	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 unit	34.184.115	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9%	229.399.527	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9%	184.673.924	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	18%	82.689.361	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	18%	82.689.361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	42.000.000					42.000.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 laporan	40.689.361	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 laporan	40.689.361	
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota		Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90%	101.984.563	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota		Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90%	101.984.563	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	31.255.875	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	31.255.875	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	70.728.688	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	70.728.688	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Daerah Kabupaten / Kota		Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90%	44.725.603						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Agen dan Pasar Rakyat.	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	44.725.603						
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	600.000.000	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	600.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,50%	600.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,50%	600.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Pesisir Selatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500 UTTP	500.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Pesisir Selatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500 UTTP	500.000.000	
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1700 pelaku usaha	100.000.000	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1700 pelaku usaha	100.000.000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	746.533.918	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	694.575.000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20 produk	746.533.918	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20 produk	694.575.000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	520.931.250	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	520.931.250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25 UMKM	173.643.750	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25 UMKM	173.643.750	
	Peningkatan sistem jaringan dan jaringan informasi perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 database	51.958.918	Peningkatan sistem jaringan dan jaringan informasi perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 database	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	262.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	226.700.000	
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	5 produk	262.500.000	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	5 produk	226.700.000	
	Pameran Dagang Nasional	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 pelaku usaha	157.500.000	Pameran Dagang Nasional	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 pelaku usaha	157.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4 pelaku usaha	105.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4 pelaku usaha	69.200.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	4.677.839.734	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	24.308.165.904	
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat	51 pasar	4.000.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat	51 pasar	23.630.326.170	
			Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935 pedagang				Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935 pedagang		
	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	51 pasar	4.000.000.000	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	51 pasar	23.630.326.170	
			Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi	1 pasar				Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi	1 pasar		
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pasar Rakyat	51 pasar	677.839.734	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pasar Rakyat	51 pasar	677.839.734	
			Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935 pedagang				Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935 pedagang		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11 dokumen	677.839.734	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11 dokumen	677.839.734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	15,20%	148.550.019	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	15,20%	148.550.019	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6 Izin	92.300.019	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6 Izin	92.300.019	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pesir Selatan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi Secara Elektronik	1 rekomendasi	48.300.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pesir Selatan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi Secara Elektronik	1 rekomen dasi	48.300.000	
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Slstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Pesir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Slstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan	44.000.019	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Slstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Pesir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Slstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan	44.000.019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	60%	26.250.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	60%	26.250.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Pesir Selatan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 dokumen	26.250.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Pesir Selatan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 dokumen	26.250.000	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	5 kali	30.000.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	5 kali	30.000.000	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pesir Selatan	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3 laporan	30.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pesir Selatan	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3 laporan	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30%	1.448.000.006	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30%	14.305.139.983	
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	9%	1.448.000.006	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	9%	14.305.139.983	
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	21321				Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	21321		
			Jumlah Sentra IKM	3				Jumlah Sentra IKM	3		
			Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk)	25				Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk)	25		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen revisi RPIK	100.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen revisi RPIK	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 dokumen	348.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 dokumen	348.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 dokumen	500.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 dokumen	13.357.139.983	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	9%	53.812.500	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	9%	53.812.500	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	53.812.500	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	53.812.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/ Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	12 dokumen	27.562.500	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	12 dokumen	27.562.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	4 dokumen	26.250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 dokumen	26.250.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30%	228.941.868	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30%	228.941.868	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100%	228.941.868	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100%	228.941.868	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15 dokumen	71.441.868	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15 dokumen	71.441.868	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	2 dokumen	157.500.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	2 dokumen	157.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0 kawasan	250.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0 kawasan	250.000.000	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	0 hektar	250.000.000	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	0 hektar	250.000.000	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Lunang, Silaut	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	0 dokumen	100.000.000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Lunang, Silaut	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 dokumen	100.000.000	
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Lunang, Silaut	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 kasus	100.000.000	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Lunang, Silaut	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 kasus	100.000.000	
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Lunang, Silaut	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 hektar	50.000.000	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Lunang, Silaut	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 hektar	50.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	25 lembaga	2.600.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	25 lembaga	2.600.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi	20 unit				Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi	20 unit		
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 unit	2.600.000.000	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 unit	2.600.000.000	
			Jumlah satuan permukiman yang dibina	1 permukiman				Jumlah satuan permukiman yang dibina	1 permukiman		
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70 KK	500.000.000	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70 KK	500.000.000	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 satuan permukiman	2.100.000.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 satuan permukiman	2.100.000.000	
	Total				17.456.386.423	Total				49.861.368.050	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat nagari/desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrebang Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD.

Berdasarkan kepada Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, terdapat 3 (tiga) usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan yang disampaikan pada Musrembang dan Forum OPD dapat diakomodir oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahap perencanaan. Usulan tersebut terdapat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan/Pagu
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN / Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Lakitan, Lengayang	Terlaksananya Pembangunan Los Pasar Rakyat	1.00 Unit	400.000.000
	Subkegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koto Taratak, Sutera	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Gambir	1 kali	40.000.000
	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Barung Belantai Induk, Koto XI Tarusan	Terlaksananya Pelatihan pengolahan gambir	1 kali	40.000.000
	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang memuat sebagai berikut :

- a. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 - 1. Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - 2. Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab
 - 3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrologian
 - 4. Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrologian
 - 5. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen
 - 6. Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 7. Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan
- b. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 - 1. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri
 - 2. Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif

3. Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas
- c. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi
 2. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.
 3. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 dan Rasionalisasi Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi hasil reuiu RPJMD tahun 2022. Kesesuaian indikator tujuan dan sasaran pada Renstra dengan rencana prioritas yang akan dicapai pada tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024.

a. Tujuan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengacu kepada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 adalah :

- 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- 2. Meningkatnya perekonomian masyarakat di Kawasan Transmigrasi
- 3. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

b. Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah :

- 1. Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja
- 2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
- 3. Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi
- 4. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas. Menentukan skala prioritas didasarkan pada urutan kegiatan yang bersifat rutin/ mengikat, karakteristik OPD dan prioritas daerah, guna mewujudkan efektivitas Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan dan perkiraan maju tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI			42.832.588.175,00				0,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			42.832.588.175,00				0,00
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			28.990.823.669,00				0,00
1,	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	-	-	4.433.797.408,00				0,00
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00				0,00
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.604.818.064,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.604.818.064,00				0,00
	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	38 Orang/bulan	3.492.079.494,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	8 Dokumen	112.738.570,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00				0,00
	3.30.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	3 dokumen	6.000.000	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	30 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	171.240.862,00				0,00
	3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	2.780.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	0 Paket	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	18.501.247,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	8 Paket	10.999.965,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	36 Dokumen	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	2.006.400,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	90 Laporan	136.953.250,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	25.000.000,00				0,00
	3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	25.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	397.789.902,00				0,00
	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	291.749.186,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	106.040.716,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	203.948.580,00				0,00
	3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	57.500.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4 Unit	28.448.580,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	24 Unit	5.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	113.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
2,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	44.000.019,00				0,00
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	44.000.019,00				0,00
	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	4 Dokumen	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik							
			<i>Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik</i>	1 laporan	44.000.019	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	0,00				0,00
	3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</i>	12 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
3,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	24.230.526.133,00				0,00
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	23.630.326.170,00				0,00
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>	51 Unit	23.630.326.170,00	- Kab. Pesisir Selatan, Sutera, Surantih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	600.199.963,00				0,00
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	11 Dokumen	600.199.963,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
4,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	65.000.109,00				0,00
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	65.000.109,00				0,00
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	30.000.109,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00				0,00
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	2 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
5,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	0,00				0,00
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00				0,00
	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	0 Pelaku Usaha	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor							
			<i>Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina</i>	4 Pelaku Usaha	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
6,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	217.000.000,00				0,00
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	217.000.000,00				0,00
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	1500 Unit	217.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	1700 Orang	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
7,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	500.000,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	500.000,00				0,00
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	10 UMKM	500.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi</i>	25 UMKM	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			13.645.139.983,00				0,00
1,	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	13.610.139.953,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	13.610.139.953,00				0,00
	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,00
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	5 Dokumen	52.999.970,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	4 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	4 Dokumen	13.357.139.983,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	12 Dokumen	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00
2,	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	0,00				0,00
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Dokumen	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</i>	0 Dokumen	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
3,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	35.000.030,00				0,00
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	35.000.030,00				0,00
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	15 Dokumen	35.000.030,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>	1 Dokumen	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			196.624.523,00				0,00
1,	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	55.000.000,00				0,00
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	55.000.000,00				0,00
	3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain</i>	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa - Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.32.02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan							
			<i>Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi</i>	1 kasus	30.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa - Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.32.02.2.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi							
			<i>Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	0 Hektar	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	141.624.523,00				0,00
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	141.624.523,00				0,00
	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman							
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 Kepala Keluarga	20.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman							
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	121.624.523,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	J U M L A H				42.832.588.175,00				0,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Program Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Rencana program prioritas beserta indikator outcome/program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU RENJA
		Rp.
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.433.797.408
	I Administrasi keuangan perangkat daerah	3.604.818.064
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.492.079.494
	2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	112.738.570
	II Administrasi umum Perangkat Daerah	171.240.862
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.780.000
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.501.247
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.999.965
	4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-
	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
	7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.006.400
	8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	136.953.250
	III Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397.789.902
	1 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	291.749.186
	2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	106.040.716
	IV Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.948.580
	1 Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	57.500.000
	2 Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	28.448.580
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
	4 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	113.000.000
	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
	V Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25.000.000
	1 Evaluasi kinerja perangkat daerah	-
	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
	VI Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-
	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000

1	2	3
	VII Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	65.000.109
	I Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	65.000.109
	1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30.000.109
	2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	35.000.000
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	217.000.000
	I Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	217.000.000
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	217.000.000
	2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	-
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	500.000
	I Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	500.000
	1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	500.000
	2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-
	I Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
	1 Pameran Dagang Nasional	-
	2 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	24.230.526.133
	I Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	23.630.326.170
	1 Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	23.630.326.170
	II Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	600.199.963
	1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	600.199.963
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	44.000.019
	I Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	44.000.019
	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-
	2 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	44.000.019
	II Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-
	1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-

1	2	3
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13.610.139.953
	I Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	13.610.139.953
	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	-
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	52.999.970
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	200.000.000
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13.357.139.983
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	-
	I Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-
	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/ Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	35.000.030
	I Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	35.000.030
	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	35.000.030
	2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	-
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	55.000.000
	I Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Satu Daerah Provinsi)	55.000.000
	1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	25.000.000
	2 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	30.000.000
	3 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	141.624.523
	I Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi	141.624.523
	1 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	20.000.000
	2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	121.624.523
	JUMLAH	42.832.588.175

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2021–2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024.

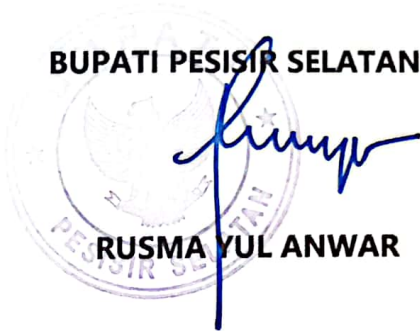
Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR